

SKRIPSI
MODEL PERILAKU PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DI
KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diusulkan Oleh :

DEWI SAGITA

Nomor Stambuk : 105640 1993 14



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: “ Model Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilihan Gubernur
Sulawesi Selatan Tahun 2018 di kota Makassar”

Nama Mahasiswa : DEWI SAGITA
Nomor Stambuk : 105640199314
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si



Muhammad Randhy Akbar, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

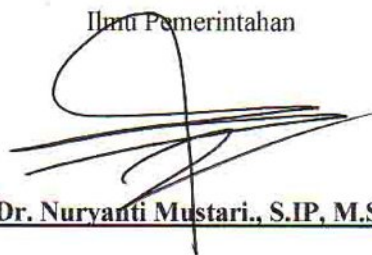
Ketua Jurusan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

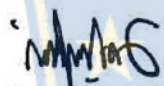
PENERIMAAN TIM

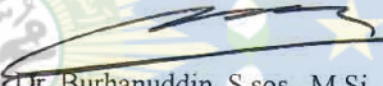
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0013/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa Tanggal 26 Bulan Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.SI. (Ketua) ()
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si ()
3. Rudi Hardi, S. Sos, M. Si ()
4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DEWI SAGITA
Nomor Stambuk : 105640199314
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Dewi Sagita

Abstrak

Dewi sagita. 2019. Model Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Jaelan Usman Dan Muhammad Randhy Akbar)

Tujuan penelitian ini membahas tentang perilaku pemilih milenial dalam proses pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis model ini mempunyai tiga komponen yang saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan 7 informan yaitu komisioner KPU Makassar, Teknsi KPU provinsi Sulawesi selatan, dan 5 pemilih milenial.

Hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perilaku politik pemilih milenial dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 di kota Makassar bahwa perilaku dari para pemilih milenial yang hidup berbarengan dengan teknologi lebih dominan pada pendekatan pilihan rasional yang melihat program kerja yang ditawarkan dan kinerja pada pemerintahan sebelumnya, serta kepopuleran calon di media sosial yang dijadikan para pemilih milenial sebagai referensi dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan: Bagi mahasiswa agar dapat memperluas dan menambah wawasan berpikir; Bagi masyarakat, sebagai referensi dan pemahaman serta pengetahuan; Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan karya tulis ini sebagai rujukan untuk penelitian dalam bidang yang serupa.

Kata kunci: Perilaku pemilih, pemilih milenial dan pemilihan Gubernur

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “ Model Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sulawesi selatan beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak Dg. Malewa dan Ibu Dg. Tapakja yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam

penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.

9. Untuk kakak-kakak saya Andi Ratna, Nasaruddin, Harianti dan Irman DM, Serta Keluarga saya yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Intan sari, Masriana, Rofidah, S.IP, Raihanah Indah Kusuma, St.Hawah, Lisa Anjarsari, Rislal Harlina, Rahmiati, Hasmila dan Muzakkirah, yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman 2014 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk kelas D.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, 28 februari 2018

Penulis

Dewi Sagita



Daftar Isi

Halaman Persetujuan	i
Halaman Penerimaan Tim	ii
Halaman Pernyataaan keaslian Karya Ilmiah	ii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan umum	9
B. Perilaku Politik	12
C. Perilaku Pemilih	16
D. Jenis-Jenis pemilih	24
E. Pemilih milenial	26
F. Kerangka Fikir	30
G. Fokus Penelitian	31
H. Defenisi Fokus Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	40
B. Karakteristik Profil Informan	48
C. Perilaku Pemilih Millenial Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan	49
1. Pendekatan Sosiologis	50
2. Pendekatan Psikologis	53
3. Pilihan Rasional	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1 : Jumlah informan penelitian	36
Tabel 2 : Jumlah pemilih tetap pilkada 2018 kota Makassar	44
Tabel 3 : Pemilih milenial Kota Makassar	45
Tabel 4 : Profil informan	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wadah untuk rakyat agar dapat mempertajam kesadaran politiknya, dengan demikian dapat menentukan pilihan politiknya berdasarkan aspirasi dan kesadarannya. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 yang berlandaskan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 merupakan awal dilaksanakannya demokrasi langsung di daerah. Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal.

Menyelenggarakan sebuah proses pemilihan umum secara langsung, jujur dan adil diperlukan komitmen semua *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemilihan secara transparan dan akuntabel. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh semua *stakeholders* yang terkait seperti penyelenggara pemilu seperti KPU dan jajarannya, panwaslu, partai politik yang mengusung pasangan calon, pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, organisasi pemantau pemilu, lembaga-lembaga pengamat serta dukungan dari masyarakat (Lumolos Jhony).

Dalam rangka menyukseskan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dimaksud adalah masyarakat ikut serta aktif dalam proses pemilihan kepala daerah secara sukarela dalam pemilihan umum, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan dari pemerintah.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta terlibat dalam kegiatan kenegaraan begitupun sebaliknya. Jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap kegiatan kenegaraan, tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat dari persentase golput dalam pilkada.

Salah satu hal yang memengaruhi dalam pemilihan calon kepala daerah dalam pilkada adalah perilaku pemilih. Secara teoritis perilaku pemilih berdasarkan teori Gaffar terdiri dari tiga model yaitu, model sosiologis, model psikologis dan model pilihan rasional. Model sosiologis adalah masyarakat memilih calon berdasarkan agama, daerah dan lingkungan tempat tinggal, model psikologis adalah memilih calon berdasarkan faktor kedekatan dengan kandidat atau dengan partai politik sedangkan model pilihan rasional adalah memilih berdasarkan visi misi, program kerja dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya.

Penerimaan dan penolakan pemilih terhadap pasangan kandidat, dalam konteks kultur Indonesia, lebih banyak disebabkan oleh hubungan yang bersifat emosional dibandingkan rasional. Dalam pemilihan kepala daerah, penilaian terhadap kandidat tidak selamanya bersifat rasional. Masyarakat mungkin menilai kandidat bukan berdasarkan kapabilitas kandidat, tetapi lebih didasarkan pada latar belakang sosial ekonomi dan ketokohnya. Mereka tidak mendasarkan pilihan pada kemampuan intelektual, wawasan, penguasaan, pengalaman pribadi bahkan visi, misi, dan program calon. Pilihan didasarkan pada keturunan, latar belakang organisasi, garis ideologis, bahkan tampilan fisik (Asfar, dalam Rofiq, 2016).

Umumnya perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani dan sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilih karena tidak diberi tahu dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, bersikap pasif, tidak memahami manfaat pemilu. Pemilih memilih calon dengan pertimbangan ikatan emosional pribadi, organisasi keagamaan, daerah asal calon, kultur atau budaya. Sebagian masyarakat pemilih hanya memilih karena mempercayai partai politik pendukung.

Perilaku politik seseorang dalam menyikapi pilkada bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan beberapa bentuk dari perilaku politik individu. Ikut serta dan bergabung dalam partai politik juga merupakan bentuk dari perilaku politik. Hal ini disebabkan bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk negara (Purboyo, 2014).

Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat (1) bahwa ada 6 kriteria pemilihan umum yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian UU pemilihan umum menambah 2 kriteria lagi yaitu transparan dan akuntabel. Tetapi fenomena pemilihan umum di berbagai negara termasuk negara maju masih menunjukkan bahwa pemilihan umum tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Konsep integritas pemilihan umum sangat penting karena napas yang meniwai pemilu adalah politik dengan sifat dasar menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.

Pemilihan umum juga tidak bisa lepas dari keterlibatan pemilih milenial dalam menyukseskan pemilu, pemilih milenial yang dimaksud adalah pemilih generasi yang lahir pada era 90an yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Generasi milenial merupakan generasi modern yang aktif bekerja, penelitian, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki rasa optimisme dan kemauan untuk bekerja dengan kompetitif, terbuka, dan fleksibel serta masih memiliki jiwa nasionalisme dan paham tentang politik yang benar dan politik yang salah.

Pemilih milenial adalah pemilih yang lahir pada tahun 1995-2001 yang kehidupan generasinya tidak dapat dilepaskan dari teknologi informasi terutama internet. Generasi milenial juga lebih menghargai perbedaan, memiliki rasa optimis yang tinggi dan sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, pemilih milenial berbeda dengan pemilih pemula, pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum. Para pemilih pemula yang kebanyakan

dari siswa-siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih, pemilih pemula juga termasuk pensiunan TNI dan Polri.

Pemilih milenial di Indonesia mampu memberikan kontribusi besar dalam politik Indonesia. Hal ini menjadikan banyak partai politik mencari tahu mengenai kriteria yang akan menjadi tolak ukur pemilih milenial dalam memutuskan siapa yang akan dipilih terutama pada saat proses pemilihan umum. Maka dari itu keputusan generasi milenial dalam menentukan pilihannya pada saat proses pemilihan umum berlangsung berpengaruh penting pada pemilu mendatang, dan dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan generasi milenial dalam memilih, antara lain *voting behavior*, *political branding* dan *political disaffection* (Azis, 2018).

Umumnya pemilih milenial masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat sehingga pemilih milenial merupakan sasaran yang tepat dari partai politik dalam memperoleh suara. kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan serta terpengaruh dengan adanya teknologi yang memuat berbagai macam informasi mengenai pemilu. Pemilih milenial umumnya memilih calon berdasarkan tingkat kepopuleran calon di masyarakat.

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan merupakan ajang demokrasi politik di Indonesia. Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) adalah perilaku pemilih yang mendukung suksesnya pemilu. perilaku politik pemilih dan partisipasi politik pemilih merupakan aspek

penting yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan aspek penunjang keberhasilan suatu pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat sendiri bisa saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan politik individu atau masyarakat itu sendiri. Latar belakang pemilih juga mempengaruhi segala pendekatan-pendekatan terhadap pemilih.

Pendekatan terhadap pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh media dan sosialisasi politik. Pilgub sebagai gerbang demokrasi rakyat, bukan untuk memilih pemimpin partai politik atau pemimpin komunitas masyarakat tertentu, tetapi memilih pemimpin seluruh masyarakat sekaligus pemimpin pemerintahan di provinsi yang mampu menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakatnya.

Proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 diikuti oleh empat pasangan calon yaitu:

1. Nurdin Halid dan Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar
2. Agus Arifin Numang dan Tanribali Iamo
3. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman
4. Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar

Pemilihan umum Gubernur Sulawesi selatan dimenangkan oleh pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman dengan perolehan suara sebanyak 1.763.460 dari 5.763.300 daftar pemilih tetap, namun yang menggunakan hak pilih hanya 4.118.209 orang. Secara umum dalam proses pemilihan umum, ada tiga faktor yang

dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan memilih atau tidak memilih yaitu, identitas partai, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye dan citra kandidat, begitupun dengan pemilih milenial dalam menentukan pilihan politiknya.

Pemilih milenial sekarang cenderung alergi terhadap politik, hal ini sesuai dengan survei litbang Kompas pada 25-27 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa hanya 11,8% generasi milenial yang mau menjadi anggota partai, 86% tidak bersedia dan 1,9% tidak tahu. Partisipasi pemilih milenial dalam Pilkada masih banyak tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena sebagian tidak peduli dengan dilaksanakannya pemilihan umum tersebut, selain itu sebagian menggunakan hak pilih secara baik seperti halnya memilih karena sesuatu alasan tertentu bukan karena memilih untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Negara ini dengan baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pemilih milenial pada Pilkada 2018 sekitar 35% dari keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu anatar 70-80 juta pemilih dari 193 juta daftar pemilih tetap (rumah pemilu.org, 31 Januari 2018).

Pemilih milenial sebagai generasi teknologi, kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi milenial, tidak terkecuali dari adanya fenomena pemilihan umum maka pemilih milenial akan mencari informasi pemilihan umum dari internet, kita semua mengetahui apapun yang ada di internet tidak dapat disaring mana yang benar dan yang salah. Karena di media sosial sebagai sarana generasi milenial untuk bersosialisasi terdapat berbagai macam informasi yang tidak bisa dipastikan

kebenarannya, Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini pula yang menyebabkan pemilih milenial sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi. Untuk mengetahui lebih jauh perilaku pemilih milenial, maka judul penelitian ini adalah “ **Model Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model perilaku pemilih milenial pada pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perilaku pemilih milenial dalam pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil dari pencapaian tujuan, dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat maka manfaat praktis dan teoritis dapat diketahui. Dengan adanya hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat dan menambah kepustakaan politik serta sebagai rujukan untuk peneliti lainnya tentang perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum.
2. Manfaat praktis, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti perilaku pemilih milenial dalam pemilu, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat, pemilu dilaksanakan agar pemerintah yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan. Menurut Ramlan Subakti, tujuan dari pemilihan umum meliputi 3 hal yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum
2. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga,
3. Sebagai sarana mobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik, guna mewujudkan tujuan tersebut, pemilihan umum harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (Fitriyah)

Pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara ataupun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di suatu daerah, perilaku politik sebagai proses penentuan pilihan politik. Perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Perilaku politik dalam pemilu dibagi dua yaitu: perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah dan perilaku politik warga

negara biasa, baik individu ataupun kelompok. Salah satu yang membentuk perilaku politik masyarakat adalah nilai budaya politik atau *civil culture* (Fera Hariani Nasutio, 2009).

Fungsi pemilihan umum sebagai rekrutmen politik, dapat dipahami berkaitan dengan negara-negara yang menganut paham demokrasi dipandang bahwa pemilihan umum secara prinsipil sebagai sumber rekrutmen politik, dengan memilih pemimpin atau pejabat baik dalam bentuk komfirmasi terhadap kepemimpinan politik yang lama maupun dengan penggantian pejabat baru dipandang sebagai fungsi pokok dalam pemilihan umum, pemerintah yang dipilih oleh rakyat, dengan melalui proses pemilihan, maka tidak diragukan bahwa pemilihan umum memang banyak terlibat dalam fungsi dan rekrutmen politik. (Sitepu dalam Rizki Rahman 2016)

Adhi Putra, 2009 mengatakan bahwa lahirnya UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi landasan normatif dalam penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin demokratis karena masyarakat dapat menentukan pilihannya, dalam perspektif teoritis dikemukakan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah suatu sistem yang memiliki sekurangnya tiga sifat yaitu:

- a. Terdiri dari banyak bagian
- b. Bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung
- c. Mempunyai pembatasan yang memisahkan diri dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.

Sedangkan dalam perspektif praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalensi tersebut dapat ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Pemain utama dalam pemilihan kepala daerah adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah, ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pemilih
2. Pendaftaran calon
3. Penetapan calon
4. Kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Penetapan calon terpilih (Adhi Putra, 2009)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio(radio) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, asas, ideologi serta janji- janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih/masyarakat setempat sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang

menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam lembaga legislatif maupun eksekutif (Kadir, 2017).

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas. Namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah. Sekaligus kepala daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting (Basuki Rachmat dan Esther, 2016).

B. Perilaku Politik

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Renciansyah 2015).

Dalam konteks perpolitikan, perilaku yang dikategorikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya merupakan sebuah bentuk konsep yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara aktif maupun secara pasif. Konsep perilaku tersebut bisa berupa partisipasi

politik. Lebih jauh lagi bahwasanya konsep perilaku turut serta berpartisipasi politik merupakan sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya. Perilaku tersebut bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Kadir, 2017).

Ramlan Subakti dalam Renciansyah 2015 mengatakan bahwa perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka (Asfar Muhammad dalam Zul Pachmi, 2014).

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik dibagi dua menjadi perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik dan perilaku politik warga Negara biasa yang tidak berwenang tetapi dapat memengaruhi pihak pembuat keputusan politik (partisipasi politik).

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti dalam Muhammad Iksan, 2014 dibagi dua, yaitu:

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan atau dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kejadian pada masa lalu dan hal yang selalu diingat. Kejadian politik secara umum maupun yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat, baik yang

menyangkut sistem politik atau ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Bentuk Bentuk Perilaku Politik Perilaku politik merupakan hal yang dilihat untuk menilai bagaimana masyarakat menunjukkan keikutsertaannya di dalam pemilihan umum yaitu diantaranya ikut dalam proses kampanye, memberikan hak suaranya atau menunjukkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum Presiden, anggota legislatif ataupun pemilihan kepala daerah dan ikut mengawasi dalam penentuan pemenang didalam pemilihan tersebut. Perilaku politik masyarakat meliputi kampanye, memberikan hak suara dan mengawasi penentuan pemenang dalam pemilihan umum;

1. Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan wakil terpilih atau referenda diputuskan.

2. Memberikan Hak Suara

Memberikan hak suara dalam pemilihan umum adalah pokok dari partisipasi politik warga negara. Dalam pemberian suara atau *vote* ini akan membuktikan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum apakah keikutsertaan

masyarakat akan besar atau kecil dalam memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara di pemukiman mereka. Pemberian hak suara dari pemilih ini yang seharusnya menjadi acuan agar besarnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan yaitu penyuluhan sosialisai tentang wajibnya ikut serta dalam pemilu, pendekatan ini menggunakan bentuk dari jiwa atau sikap, untuk menjelaskan perilaku seseorang agar tumbuh dalam dirinya.

3. Mengawasi penentuan pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam aktivitas politik karena Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Setelah berpartisipasi pada pemilihan umum, masyarakat berhak untuk mengawasi keputusan hasil dari pemilihan umum tersebut, adapun peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan.

C. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Dinyatakan sebagai pemilih apabila telah terdaftar sebagai pemilih oleh petugas pendata pemilih. Pemilih

dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya (Fera Haryani, 2009).

Perilaku pemilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum secara langsung. Pemberian suara atau votting secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut dan menentukan di antara anggota kelompok sebagai seorang pejabat maupun pengambil keputusan (Fera Haryani, 2009).

Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. Perilaku tertentu bahkan kadang-kadang sengaja ditampakkan untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya. Dengan demikian, perilaku yang diamati mungkin saja dapat menjadi indikator sikap dalam konteks situasional tertentu akan tetapi interpretasi sikap harus sangat hati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang ditampakkan oleh seseorang (Saifuddin Azwar dalam Muhammad Bawono 2008).

Studi mengenai pemilihan umum dalam kajian ilmu politik dikenal dengan konsep perilaku pemilih (*votting behavior*), perilaku pemilih terbentuk oleh suatu proses sosialisasi politik, sedangkan keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Menurut Berelson dalam Indrti, perilaku pemilih adalah proses pembuatan keputusan dan faktor –faktor sosial

yang mempengaruhi pola pemberian suara atau keikutsertaan dalam pemilihan umum (Rofieq dan Nuryono, 2016).

Gaffar dalam Yustiningrum (2015), mengatakan bahwa secara garis besar ada tiga model atau mazhab yang digunakan dalam studi perilaku memilih yaitu model sosiologis, model psikologis dan model pilihan rasional atau dikenal juga dengan model ekonomi politik. Berikut akan diuraikan tiga model perilaku memilih tersebut,

1. Model sosiologis

Perilaku memilih dengan menggunakan analisis sosiologi pertama kali dikembangkan oleh sarjana Universitas Colombia, sehingga pendekatan ini dikenal juga dengan sebutan mazhab coloumbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga, agama, ideologi, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilaku dapat diterima lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilihan umum. Berdasarkan pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, tetapi suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dia berada, serta dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat.

2. Model psikologis

Pendekatan psikologis, yang dikembangkan oleh beberapa sarjana—Campbell *et al.* (1960), Jaros & Grant (1974), Rose & McAllister (1990) dan

lainnya—dari Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan ini tidak jarang disebut sebagai Michigan's school yang menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat tergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Identifikasi kepartaian adalah wujud dari sosialisasi politik yang bisa dibina oleh orangtua, organisasi sosial kemasyarakatan dan lainnya. Sosialisasi ini berkenaan dengan nilai dan norma yang diturunkan oleh orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan dan lainnya sebagai bentuk penurunan dan penanaman kepada generasi baru.

Berdasarkan teori dari Dieter Roth dalam Yustinigrum (2014), Ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis, yaitu:

- a. Persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat
- b. Persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat
- c. Identifikasi partai atau *partisanship*.

Berdasarkan pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap perilaku pemilih tidak dapat dilihat hanya dari struktur sosial sebagaimana yang dikemukakan dalam pendekatan sosiologis (mazhab coloumbia) tetapi berdasarkan faktor jangka pendek dan jangka panjangnya kepada pemilih.

Menurut Dieter Roth, sejak tahun 1970-an isu dalam studi pemilihan umum dibagi menjadi dua yaitu *position issue* dan *valence issues*. *Position issue* adalah suatu isu yang setiap kelompok atau partai memiliki posisi serta tujuan, bukan hanya berbeda tetapi juga bertentangan, salah satu contoh isu seperti kasus aborsi, yaitu antara kelompok *pro-life* dan *pro-choice*.

Sedangkan *valence issue* tidak menyangkut perbedaan tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan sebagai contoh, setiap partai pasti telah sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga negara, termasuk buruh, dalam konteks pemilihan umum, *position issue* lebih mempengaruhi keputusan para pemilih meskipun demikian, biasanya *position issue* lebih jarang Liddle dan koleganya Mujani dan Ambardi, termasuk yang berpendapat bahwa faktor psikologi terutama kepemimpinan dan identitas partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa maupun kelas sosial.

Pendekatan ini melihat faktor psikologis yang melatarbelakangi pilihan seseorang. Konsep yang ditawarkan adalah identifikasi partai. Konsep ini mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.

3. Model pilihan rasional

Menurutnya pengaruh kelas agama dan politik telah mendorong para pengkaji tentang perilaku memilih menemukan penjelasan selain pemisahan antara sosiologis yang mendorong semakin besarnya faktor ekonomi, kepribadian, isu dan media. Terdapat pergeseran dalam studi perilaku memilih ke model yang lebih menekankan seorang warga negara sebagai aktor yang lebih mandiri dari partai dan struktur kolektif serta ikatan kesetiaan.

Teori pilihan rasional (*rational choice*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Anthony Downs sebenarnya hanya terbatas pada studi pemilihan umum. Dan bagaimana demokrasi diukur dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi. Salah satu kunci dalam Dalam perspektif teori ekonomi Downs tentang demokrasi adalah bahwa arena pemilu seperti sebuah pasar yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). penawaran dan permintaan berdasarkan ilmu ekonomi, pilihan rasional hanya akan ada jika partai politik yang akan masyarakat pilih juga bertindak rasional, seperti juga pemilih, partai politik mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan dan gengsi.

Teori ini dibangun dari kombinasi teori-teori aksi sosial dan teori ekonomi tentang rasionalitas. Downs mendefinisikan rasionalitas sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling *reasonable*. Definisi ini “diturunkan” dari teori ekonomi dengan cara yang paling *reasonable* adalah cara seseorang, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimilikinya, mewujudkan tujuannya dengan menggunakan input sumber daya yang paling sedikit. Dengan kata lain, seorang individu yang rasional tertarik terhadap cara yang biayanya paling efektif dalam memaksimalkan apa yang ia peroleh

Kriteria pilihan rasional mengasumsikan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang ia inginkan sebagai sebuah *outcome* dan memiliki seperangkat kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda untuk menjamin pilihannya sebagai sebuah alternatif

setiap waktu. Maksudnya seseorang diasumsikan mempunyai informasi yang memungkinkannya membuat pilihan tersebut.

Downs menyusun lima kriteria rasionalitas yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan dapat dikatakan sebagai pilihan rasional yaitu

- a. Individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada serangkaian alternatif pilihan
 - b. Individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara berurutan
 - c. Susunan preferensi tersebut bersifat transitif, contoh individu lebih memilih alternatif 1 daripada alternatif 2, lebih memilih alternatif 2 daripada alternatif 3, dan seterusnya, dengan konsekuensi bahwa pilihan 1 lebih diutamakan dari pilihan-pilihan berikutnya
 - d. Individu akan selalu memilih alternatif yang ia merasakan paling dekat (utama)
 - e. Jika dihadapkan pada berbagai pilihan di waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama
- Tentang pemberian suara (*voting*),

Adhi Putra Wijaksono, 2009 mengemukakan bahwa Pola perilaku pemilih pada masa orde baru tidak mencerminkan perilaku yang demokratis, akan tetapi pola perilaku politik masa silam dengan catatan seperlunya masih cukup berguna terlebih dengan masih terbatasnya hasil penelitian tentang perilaku pemilih pada era reformasi. Beberapa hasil studi serta catatan tentang perilaku pemilih di Indonesia dapat disimpulkan dengan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Orientasi agama
2. Faktor kelas sosial dan kelompok sosial
3. Faktor kepemimpinan dan ketokohan
4. Faktor identitas
5. Orientasi isu
6. Orientasi kandidat
7. Kaitan dengan peristiwa
8. Rekonfigurasi papan catur politik

Carpini dan Keeter, menyatakan bahwa pembahasan tentang perilaku pemilih mengalami peningkatan dalam beberapa dekade ini, permasalahan utamanya kebanyakan pemilih hanya memiliki informasi yang terbatas untuk membuat keputusan dan hal tersebut mulai dapat diterima oleh ahli padahal sebelumnya, pendapat Lau dan Sears menjelaskan bahwa pemilih adalah orang yang secara kognitif atau kikir ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi kandidat, dimana mereka sangat tidak mau mendayagunakan sumber daya yang signifikan dalam mengumpulkan informasi yang menyeluruh (Adhi Putra Wijaksono, 2009).

D. Pemilih Milenial

Milenial atau generasi milenial berasal dari kata millenials yang diciptakan oleh Strauss dan Howe, dalam KBBI berdasarkan versi kementerian pendidikan dan kebudayaan milenial berkaitan dengan kata milenium, dalam bahasa Arab milenium disebut dengan “alaf” yang berarti masa atau jangka waktu seribu

tahun, jadi milenial berkaitan dengan generasi yang lahir pada tahun 1995-2000an yang kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari teknologi dan informasi.

Generasi milenial adalah adalah agen-agen perubahan suatu negara, dan dengan partisipasi mereka dalam kancah politik diharapkan akan membawa perubahan yang terdapat di dalam demokrasi. Sebaliknya, jika generasi milenial apatis dan masa bodoh terhadap kancah politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, akan membuat demokrasi jalan ditempat Isnaini (2017).

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “*Digital Native*” lahir dan tumbuh berbarengan dengan teknologi. Khususnya di media sosial atau dikenal sebagai gerakan *online activism* adalah cara generasi milenial menggabungkan keadaan sosial dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, generasi milenial juga kerap memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam makna positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu yang kreatif dan inovatif (Isnaini 2017).

Strauss dan Howe, sebagaimana dikutip Metcalf (2016) mendefinisikan generasi sebagai agregat dari semua orang yang lahir selama rentang waktu sekitar dua puluh tahun atau sekitar satu rentang fase kehidupan yaitu anak-anak, dewasa muda, usia pertengahan dan usia tua. Masing-masing generasi mempunyai kecenderungan karakter, kepercayaan, nilai dan tingkah laku yang berbeda, dibentuk dan dipengaruhi oleh periode sejarah tertentu dimana mereka tumbuh dan menjadi dewasa. Umumnya peristiwa besar serta tren sosial-kebudayaan mengubah secara fundamental *zeitgeist*. generasi itu tumbuh dan dibesarkan.

Pengelompokan generasi adalah adanya premis bahwa generasi adalah sekelompok individu yang dipengaruhi oleh kejadian – kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka dan kejadian serta fenomena tersebut menyebabkan terbentuknya ingatan secara kolektif yang berdampak dalam kehidupan mereka. Jadi kejadian historis, sosial, dan efek budaya bersama dengan faktor-faktor lain ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku individu, nilai, dan kepribadian (Caspi & Roberts).

Perbedaan generasi, dengan sampel mulai dari tahun 1950an sampai dengan awal tahun 2000, menunjukkan perbedaan karakteristik dari 3 kelompok generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X dan generasi Y (Millennial), salah satunya adalah penelitian dari Oblinger & Oblinger dalam Yanuar Surya Putra, (2016), yang memberikan hasil sebagai berikut :

1. Baby Boomers (1947–1964), generasi yang lahir setelah Perang Dunia II yang dampaknya masih terasa dalam beberapa tahun di setiap negara terutama yang terlibat langsung. Era ini merupakan masa awal pertumbuhan politik yang ditandai masih adanya gejolak pertentangan ideologi yang ingin dipakai di Negara yang baru saja lahir, dengan ciri idealis, hidup berdikari dan kurang bergantung pada keluarga, kerja dan pekerjaan. Punya rasa optimis yang tinggi, pekerja keras yang menginginkan penghargaan secara personal, percaya pada perubahan dan perkembangan diri sendiri.
2. Generation Xers (1965-1980), lahir pada tahun – tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi dengan ciri telah terpapar oleh perkembangan gemerlap budaya pop, skeptis terhadap otoritas dan

kemerdekaan, ingin berwirausaha, hidup damai, stabil, serta mempunyai keluarga sebagai tujuan hidup, menyadari adanya keragaman dan berpikir global, ingin menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan, bersifat informal.

3. Generasi Y (1981-1994), adalah generasi yang tumbuh dengan komputer, email dan komunikasi mobile dengan menggunakan internet sebagai sumber dari segala informasi, bersifat fleksibel kreatif dan menjadikan kebebasan berfikir sebagai prioritas.
4. Generasi milenial (1995-2010), Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instan messaging* dan lahirnya media sosial. Kata milenial berasal dari kata millennium yang artinya kurung waktu 1000 tahun dalam kalender, dalam bahasa arab dikenal dengan kata alaf. Milenium dalam kamus besar bahasa Indonesia versi kemendikbud adalah kehidupan generasi yang tidak dapat dilepaskan dari teknologi informasi terutama internet. Generasi milenial juga lebih menghargai perbedaan, memiliki rasa optimis yang tinggi dan sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi.

Era milenial berbasis *digital application* dewasa ini menjadi isu utama dalam berbagai lini. Akan tetapi di sisi lain, generasi milenial rentan akan *social media harassment* hingga persoalan *cybercrime* yang memberikan pengaruh negatif terhadap kematangan pikir generasi muda. Dalam perkembangannya, media sosial telah berperan tidak hanya sebagai *online interaction* namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Munculnya berbagai komunitas online atau

media sosial menjadi fasilitator sosio-politik yang aktif digalakkan kaum muda generasi milenial (Retnayu. 2017).

Tapscott dalam Isnaini (2017) mengemukakan bahwa sebagai generasi yang besar pada era digital, generasi milenial akan menyapu habis model politik konvensional. Generasi milenial justru ingin dilibatkan secara langsung, berinteraksi dengan politisi dan masyarakat, menyumbangkan gagasan, melahirkan prakarsa katalisator tidak hanya selama pemilihan, tetapi juga pemerintahan.

Adapun ciri-ciri dari generasi milenial menurut Lyons dalam Faizal Azis, (2018) adalah sebagai berikut

1. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya
2. Sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi,
3. Lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi,
4. Reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya,
5. Memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.

Generasi milenial di Indonesia adalah pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Dalam setiap aktivitas sosial mereka hampir seluruh provinsi, mereka sangat terbuka dan responsif dengan perkembangan politik dan ekonomi daerahnya. Hal ini tentu berakibat pada sikap mereka yang juga sangat aktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Mampu menghadapi beragam rintangan dan melihat peluang yang dapat diraih. Oleh karena itulah Tapscott (2013) dalam

teorinya mengemukakan bahwa kesadaran modernitas generasi milenial atas nasionalisme tidak lagi bersifat historis melainkan sangat fungsional. Mereka hadir melakukan ekspansi untuk menggantikan generasi sebelumnya. Perubahan dan inovasi selalu dimunculkan untuk membuat sejarah baru (Isnaini, 2017).

Generasi milenial ini tercatat banyak berperan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial politik, dan IPTEKS. Di Tiongkok, Joshua Wong yang masih berumur 17 tahun, berhasil memobilisasi 120.000 orang yang menentang kurikulum berbau komunis. Dalam dunia sosial politik, keriuhan di Timur Tengah yang dikenal dengan *arab spring*, misalnya, berasal dari mobilitas melalui *facebook* oleh para pemuda belia. Di Amerika, keberhasilan Barrack Obama dalam Pemilu presiden memperoleh 66% suara dan John McCain hanya memperoleh 23% suara yang langsung dipilih oleh generasi muda di bawah usia 30 tahun. Kehidupan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi (Retnayu, 2017).

Menurut Howe dan Strauss, generasi milenial akan menggunakan kemampuan digitalnya untuk membangun dan menjaga jaringan pertemanan. Lebih lanjut menurut Howe dan Strauss (2007), gelombang pertama generasi milenial memang sangat tergantung pada komunitas daring (online) untuk membantu hidup mereka setelah lulus sekolah. Sejalan dengan bertambahnya usia dan memasuki usia menjadi pemilih, generasi milenial akan menjadi kekuatan baru politik. Mereka melihat politik sebagai alat untuk mengubah tujuan sekolah menjadi kemajuan masyarakat Isnaini (2017).

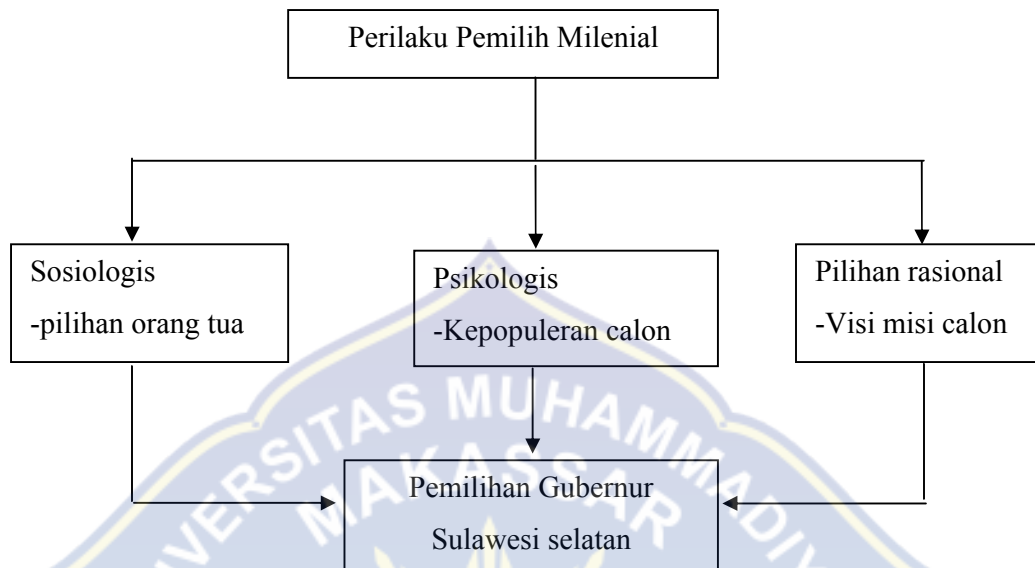
Pemilih milenial akan mengacaukan para pakar mengenai kontestasi dalam pemilihan. Mereka akan mendukung kandidat yang disukai –terutama yang bisa menerjemahkan tekad spiritual menjadi otoritas publik Mereka akan menolak apa yang dianggap sebagai negativisme, moralisme, dan keegoisan politik nasional yang mereka saksikan ketika masih anak-anak. Ketika mereka bertemu dengan pemimpin yang berpegang pada cara lama, mereka akan bekerja untuk mengalahkan mereka Isnaini (2017).

Pemilih generasi milenial berdasarkan pemahaman Ali dalam Isnaini (2017) adalah pemilih yang lahir tahun 90 an, dengan karakteristik cenderung bukan pemilih ideologis, memiliki sikap politik yang cenderung apatis dan banyak diantara mereka yang *swing voters*, dan cenderung tidak memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap partai. Generasi ini, menurut Harmadi (2016) besar dan tumbuh di tengah derasnya arus teknologi informasi, cenderung memiliki perilaku yang relatif mirip, termasuk soal pilihan dalam berpolitik dan berdemokrasi, sehingga sering disebut sebagai *connected kids*.

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan kajian diatas yang telah dijelaskan dengan beberapa konsep dan teori yang terkait mengenai perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum dapat dijadikan dasar pengkajian adalah, pemilihan umum kepala daerah, perilaku politik, perilaku pemilih dan konsep pemilih milenial. Ada beberapa indikator yang terkait dengan perilaku pemilih sesuai dengan teori dari Gaffar dalam Yustiningrum yaitu, model sosiologis, model psikologis, model pilihan rasional

Bagan kerangka pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum Gubernur Sulawesi selatan di kota Makassar dengan beberapa indikator perilaku yaitu, sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis adalah bahwa perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dimana dia berada, serta dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat. Pendekatan psikologis adalah adalah identifikasi partai yang mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai. Serta pendekatan pilihan rasional yang menganggap bahwa arena pemilu seperti sebuah pasar yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Penawaran dan permintaan berdasarkan ilmu ekonomi, pilihan rasional hanya akan ada jika partai

politik yang akan masyarakat pilih juga bertindak rasional, seperti juga pemilih, partai politik mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan dan gengsi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih milenial pada Pemilihan umum Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018, seperti yang telah dijelaskan pada kerangka teori dan definisi konseptual, bahwa perlu diturunkan poin-poin dalam kategori dan indikator perilaku pemilih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. sosiologis, adalah pemilih yang memilih calon kepala daerah berdasarkan pada pilihan orang tua, kebanyakan pemilih milenial memilih calon dalam pemilihan umum, sesuai dengan pilihan orang tua, karena ketidaktahuan pemilih milenial tentang pemilihan umum sehingga ikut apa yang orang tua sarankan.
2. psikologis, yaitu calon pemilih memilih kepala daerah dengan faktor kepopuleran kandidat dalam pemilihan umum. Kebanyakan pemilih milenial memilih calon Gubernur yang sudah sering dilihat di media sosial maupun di media massa.
3. pilihan rasional, yaitu memilih calon kepala daerah berdasarkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan. Pemilih milenial memilih calon Gubernur atau kepala daerah karena visi misi serta program kerja yang ditawarkan dan dapat meyakinkan pemilih milenial bahwa program kerja dan visi misi yang ditawarkan dapat memajukan daerahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 20 oktober sampai 20 desember 2018. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Makassar. Karena pemilihan milenial dalam pemilihan gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 yang secara nasional dengan jumlah mencapai 30% dari daftar pemilih tetap dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum Gubernur Sulawesi selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara, yang bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Menurut (Sugiyono, 2013) Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati.

Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan digambarkan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel sesuai dengan proses kerja yang terjadi. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Artinya peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum.

C. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan, data-data mengenai informan maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2013) adalah salah satu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, adalah orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, namun jumlah untuk informan penelitian yang mendalami masalah dalam penelitian ini dianggap terlalu banyak sehingga peneliti mengambil informan melalui teknik *purposive sampling*.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Informan	Jumlah Informan
1	Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar	1
2.	Staf KPU Provinsi Sulawesi Selatan	1
3	Pemilih milenial	5
	Total	7

(tabel 1: jumlah informan penelitian)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada data obyektif. Oleh karena itu perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah, untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

2. Observasi Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang akan diteliti di lokasi penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana bentuk teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam mempelajari karakteristik perilaku pemilih milenial dalam pemilu dan sekaligus sebagai *cross check* atas kebenaran informasi yang diperoleh dari informan.

F. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna.

Namun demikian peneliti pada tahap ini telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah,

berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- a. Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data.
- b. Mengecek data dari pengaruh peneliti.
- c. Mengecek melalui triangulasi.
- d. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
- e. Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f. Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau dugaan sementara.

G. Keabsahan Data

Data penelitian dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut (Sugiono, 2012)

1. Panjang masa penelitian

Penelitian akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan pengamatan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamatai secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratan.
- c. Triangulasi waktu yaitu waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran Wilayah Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II Sulawesi. sebagaimana yang tercantum dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 74 serta tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 1882. Kota Makassar dijadikan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang berdasar pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 94), sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 daerah tingkat II Kotapraja Makassar berubah menjadi daerah tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar pada tanggal 31 Agustus 1971 diubah namanya menjadi Ujung Pandang, wilayahnya kemudian dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengambil bagian dari wilayah Kabupaten lain yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangannya, nama Kota Makassar diubah kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kotamadya

Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, disebabkan karena keinginan dari masyarakat serta didukung oleh DPRD tingkat II Ujung Pandang pada saat itu, serta beberapa masukan dari budayawan, seniman, sejarawan dan pemerhati hukum serta para pelaku bisnis.

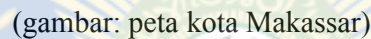
Hingga pada tahun 2013 Kota Makassar kini telah berusia 406 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 yang ditetapkan hari lahir Kota Makassar pada tanggal 9 Nopember 1607. Kota Makassar terus melakukan pembenahan untuk menjadi kota dunia. Kota dunia yang dimaksud adalah kota yang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan jasa, akan tetapi sebagai pusat industri, pusat layanan pendidikan dan kesehatan serta sebagai jasa angkut barang baik darat, laut maupun udara.

Wilayah Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 20 kilometer dari sebelah selatan ke utara, memiliki topografi yang relatif datar. sekrang Kota Makassar dirancang unuk dijadikan sebagai pusat pengembangan kawasan terpadu Mamminasata. Kota Makassar dengan luas wilayah 175,77 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Selain daerah daratan, Kota makassar mempunyai wilayah kepulauan yang dapat terlihat dari garis pantai Kota Makassar. Pulau-pulau di wilayah Kota Makassar adalah bagian dari dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan kecamatan Ujung Tanah. Pulau-pulau tersebut adalah pulau karang dengan jumlah 12 pulau yaitu Kepulauan Spermonde diantaranya Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau

Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta implementasi dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, mendorong kesadaran politik rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum agar tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Lahirnya UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi landasan normatif dalam penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan umum secara langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah semakin demokratis karena masyarakat dapat menentukan pilihannya.

Pemilukada langsung adalah momentum yang tepat dalam menentukan calon kepala daerah yang mempunyai kualitas yang baik. Suksesnya pilkada



langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan aman tetapi manfaat serta hasil yang diperoleh. Proses pemilihan umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 berikut penulis lampirkan daftar pemilih tetap yang ada di kota Makassar berdasarkan data KPU Makassar tahun 2018,

(tabel 2: jumlah pemilih tetap dalam pilkada 2018 kota Makassar)

NO	KECAMATAN	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA SERENTAK 2018		
			LK	PR	JUMLAH
1	MARISO	117	19,173	20,401	39,574
2	MAMAJANG	127	18,784	20,685	39,469
3	MAKASSAR	171	27,365	29,011	56,376
4	UJUNG PANDANG	54	9,965	10,750	20,715
5	WAJO	74	10,669	11,392	22,061
6	BONTOALA	114	18,741	19,671	38,412
7	TALLO	249	46,189	47,377	93,566
8	UJUNG TANAH	64	11,967	12,282	24,249
9	PANAKKUKKANG	275	56,234	58,332	114,566
10	TAMALATE	318	71,633	74,085	145,718
11	BIRINGKANAYA	376	59,803	64,322	124,125
12	MANGGALA	213	44,585	46,224	90,809
13	RAPPOCINI	281	50,216	52,355	102,571
14	TAMALANREA	215	32,798	35,228	68,026
15	KEP.SANGKARRANG	22	5,227	5,372	10,599
TOTAL		2,670	483,349	507,487	990,836

(sumber : KPU Makassar)

Pemilih milenial sebagai generasi yang kehidupannya banyak menghabiskan waktu di media sosial tentu dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi dari media soaial, sehingga para pemilih milenial dapat membuat berbagai pertimbangan berdasarkan apa yang didapatkan di media sosial ataupun internet. Sebagai pemilih dengan persentase terbanyak dari daftar pemilih tetap maka peran generasi milenial dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum sangat dibutuhkan, terlebih lagi kemampuannya mendapatkan berbagai macam informasi maka akan menunjang referensi dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum khususnya dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

Total daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tabel tersebut sebanyak 30% dari daftar pemilih tetap adalah pemilih milenial di kota Makassar yaitu sebanyak 406222 yang terdiri dari 15 kecamatan, 153 kelurahan dan 3.998 TPS dengan rincian sebagai berikut,

(tabel 3 : pemilih milenial kota Makassar)

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	209057
2.	Perempuan	197165
Total		406222

Besarnya jumlah suara dari pemilih milenial sehingga keberadaannya kerap disebut dapat menentukan arah politik bangsa Indonesia kedepan. Pemilih milenial belum tentu memilih calon milenial disebabkan karena generasi milenial lebih mengutamakan rasionalitas bukan sekedar usia calon, suku atau kesamaan

ideologi tetapi lebih kepada bagaimana calon menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lingkungannya.

Gambaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sekarang adalah KPU keempat yang didirikan sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Kepres No 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota yang terdiri atas unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama kali dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk berdasarkan Keppres No 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang terdiri atas unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai KPU yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai komisi penyelenggara pemilu yang permanen serta Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum. KPU dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya harus bertanggung jawab sesuai peraturan Undang-Undang serta dalam hal penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya dengan memberikan laporan kepada Presiden dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu mengatur kedudukan panitia pemilihan umum yaitu PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan panitia penyelenggara pemilu. Panitia memiliki peran

penting dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum agar terwujudnya pemilu langsung yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk mencapai KPU dan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum, ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu agar kode etik penyelenggara pemilu dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu, dengan dibentuknya Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan jumlah anggota KPU adalah 11 orang dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Tugas dan Wewenang

Pasal 10 Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum serta Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, diuraikan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara atau dikenal dengan Tps
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. Menetapkan seluruh hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
6. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum
7. Memimpin tahapan kegiatan dalam proses pemilihan umum.

B. Karakteristik Profil Informan

Pembahasan ini penulis akan membahas tentang data-data yang penulis dapatkan dari lokasi penelitian yang terdiri dari pernyataan beberapa informan yang dihasilkan dari melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi yang

akan dipaparkan secara berurutan. Pada bagian pertama penulis akan membahas atau menulis karakteristik tentang identitas dari masing-masing informan seperti yang dipaparkan pada table berikut ini :

(tabel 4: profil informan)

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Inisial
1.	Andi Syaifuddin	L	Komisioner KPU Makassar	AS
2.	Azis	L	Teknisi KPU Provinsi Sulsel	A
3.	Nunu Febriana	P	Masyarakat	NF
4.	Dianti	P	Mahasiswa	D
5.	Andi Uswatun Hasanah	P	Mahasiswa	AU
6.	Amriadi	L	Mahasiswa	AR
7.	Muh.Rafsanjani	L	Wiraswata	MRA

C. Perilaku Pemilih Millenial Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan

Pilkada merupakan wadah bagi masyarakat untuk memahami bagaimana demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mewujudkan pilkada yang baik bagi semua belah pihak, baik menang maupun yang kalah. Pilkada juga melibatkan para pemilih yang akan memilih pilihannya dan melaksanakan hak pilihnya tersebut, tapi sangat diperlukan pemahaman masyarakat mengenai pilkada.

Berdasarkan konteks politik, perilaku berkaitan dengan respon atau interaksi pemilih terhadap sebuah sistem politik, yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan partisipasi politik. Perilaku memilih pada dasarnya berawal dari asumsi mendasar mengenai kemampuan politik dari pada pemilih yang meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman dan perhatian terhadap masalah-masalah politik. Ketika seorang pemilih akan membuat sebuah keputusan yang penting, mereka harus memahami pilihan-pilihan yang dihadapi dalam politik. Warga negara harus memiliki pengetahuan yang memadai jika mereka berkeinginan untuk memilih para kandidat.

Perilaku memilih berawal dari asumsi-asumsi mendasar mengenai kemampuan politik dari pada pemilih yang meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman dan perhatian terhadap masalah-masalah politik. Ketika seorang pemilih akan membuat sebuah keputusan yang penting, mereka harus memahami pilihan-pilihan yang dihadapi dalam politik. Warga negara harus memiliki pengetahuan yang memadai jika mereka berkeinginan untuk memilih para kandidat yang kompetibel.

Perilaku memilih menyangkut tingkahlaku seseorang dalam menetapkan pilihannya yang dianggap sangat disukai atau yang paling cocok. Secara umum, teori mengenai perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh tiga pendekatan dari teori Afan Gaffar yaitu model sosiologis, model psikologis dan model pilihan rasional. Merujuk pada pendekatan-pendekatan tersebut, maka penulis mencoba menggambarkan dan menganalisis kecenderungan perilaku pemilih berdasarkan ketiga model tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut.

1. Model Sosiologis

Model ini lebih menekankan kepada faktor-faktor sosiologi yang kemudian membentuk perilaku memilih seseorang. Model ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Model sosiologis yang dimaksud adalah preferensi pemilih milenial dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, seperti agama, profesi, kelas sosial serta peran orang tua yang bisa mempengaruhi pilihan pemilih.

Perilaku pemilih milenial di kota Makassar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berdasar pada model sosiologis, berdasarkan wawancara dengan saudari D sebagai berikut,

“ Saya memilih karena orangtua saya memilih pasangan tersebut, dan saya sebagai anaknya mau tidak mau harus mendukung apa yang menjadi pilihan orang tua saya (wawancara, 29-11-2018) ”

Hasil wawancara dengan saudari D (22 november 2018) sebagai seorang pemilih milenial di kota Makassar, menyatakan bahwa saudari D memilih pasangan calon Gubernur dalam pilgub 2018 karena mengikuti pilihan orang tua, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang penting bagi seorang pemilih milenial dalam memutuskan memilih atau tidak, serta pilihan orang tua dalam menentukan pilihan pemilih milenial dalam pemilihan Gubernur Sulawesi selatan karena mereka tidak mampu melihat karakteristik pemimpin yang akan dipilihnya, mereka menganggap pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik karena sudah memiliki pengalaman dari

pemilihan-pemilihan sebelumnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh saudara NF sebagai berikut

“Awalnya memang saya memilih calon pada pilgub kemarin karena ikut pilihan orang tua tapi setelah saya melihat dari beberapa berita baik itu di televise atau medsos saya menjadi yakin dengan apa yang saya pilih dan apa yang orang tua saya pilih”.

Pilihan orang tua bagi seorang pemilih milenial merupakan sesuatu yang dianggap benar bagi sebagian besar pemilih, tanpa mengetahui baik buruknya calon sesuai wawancara dengan saudara NF pada 29 november 2018. Tatepi di era teknologi seperti sekarang semua orang bisa mengakses internet tidak terkecuali pemilih milenial yang merupakan generasi yang lahir seiring dengan perkembangan teknologi. dan kemajuan teknologi dan lainnya mampu mempengaruhi pemilih milenial dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gaffar dalam Yustiningrum (2010) bahwa Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dia berada, serta dari berbagai ikatan sosial yang ada dimasyarakat. Selain itu David Apter dalam Indar Melani (2014) menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya persamaan pilihan seorang anak dan pilihan orang tuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab keluarga adalah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya.

Proses paling dini, pembentukan sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan keluarga. Fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan orang tua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orang tua mereka terhadap isu-isu politik, ikatan-ikatan sosiologis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang. Hal berbeda diungkapkan oleh saudari AU sebagai berikut,

“Saya tidak memilih sesuai pilihanya orang tua, karena saya juga lihat calon sesuai pilihan dan keinginan saya sendiri, karena belum tentu pilihannya orang tua itu yang paling tepat”

Saudari AU dalam wawancara pada (08 desember 2018), menyatakan bahwa pada pilgub Sulawesi selatan saudara AU tidak memilih karena itu pilihan orang tua tetapi saudari AU memilih karena keinginannya sendiri, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa AU sebagai pemilih milenial memiliki refensi sendiri dalam proses pemilihan umum, pemilih milenial juga memiliki pandangan tersendiri mengenai calon mana yang bisa menjadi pemimpin yang bisa memimpin suatu daerah atau suatu negara.

Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari generasi milenial menurut Lyons dalam Faizal Azis, (2018) bahwa generasi milenial lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, Mereka melihat politik sebagai alat untuk mengubah tujuan sekolah menjadi kemajuan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis tentang pendekatan sosiologis pemilih milenial rata-rata memilih calon Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 memilih berdasarkan pilihan orangtua, karena mereka meyakini semua pilihan orang tua

pasti benar, dan sesuai dengan visi misi calon tersebut karena orang tua sudah memiliki banyak pengalaman dalam proses pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan survey poltracking Indonesia tahun 2017 bahwa pengaruh pilihan orangtua sebanyak 13.30% dari 800 responden, yang karena pemahaman pemilih milenial tentang politik dan pemilihan umum khususnya masih sangat minim dan didukung oleh sikap apatisnya terhadap pemilu serta besarnya peran orangtua dalam menentukan pilihan politik anaknya.

2. Model Psikologis

Perilaku pemilih berdasarkan model psikologi bergantung kepada sosialisasi politik lingkungan pemilih. Identifikasi kepartaian sebagai bentuk dari sosialisasi politik yang bisa dilakukan oleh orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan dan lainnya. Sosialisasi ini berkaitan dengan nilai serta norma yang diajarkan oleh orangtua, organisasi kemasyarakatan dan lainnya sebagai bentuk penurunan dan pemahaman kepada generasi baru.

Model ini mengemukakan bahwa faktor psikologis yang menjadi alasan pilihan seseorang dengan berdasarkan identifikasi partai yang mengacu pada proses pemilihan melalui nama seseorang yang dianggap dekat dengan salah satu partai. Model psikologis yang dimaksud adalah preferensi pemilih milenial dalam pemilihan umum berdasarkan hubungan kedekatan dengan calon, tim sukses, atau karena faktor kedekatan dengan partai politik serta kepopuleran calon.

Perilaku pemilih milenial di kota Makassar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan berdasar pada pendekatan psikologis, berdasarkan wawancara dengan saudara NF pada 29 november 2018 bahwa, dalam

menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018, pemilih milenial melihat rekam jejak serta pengalaman dari pasangan calon dalam pemerintahan sebelumnya, serta ramainya kampanye-kampanye yang sering dilakukan di media sosial, yang bisa membuat orang lain terpukau dan menjadikannya idola dari hasil kerja yang baik dalam pemerintahan. Terkait kepopuleran atau idola para pemilih milenial pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 dalam wawancara dengan saudara AR bahwa,

“Iya, saya memilih karena kagum dengan beliau, pengalamannya hasil kerjanya menurut saya sangat luar biasa, yang mungkin saja tidak bisa dicapai oleh orang lain, dan itu juga menjadi salah satu alasan saya sehingga memilih calon tersebut”.

Kepopuleran calon serta kekaguman para pemilih milenial terhadap calon kepala daerah merupakan salah satu alasan pemilih milenial dalam menentukan pilihannya serta hasil kerja yang dicapai dalam proses pemerintahan sebelumnya. Terkait dengan kepopuleran calon dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum juga disampaikan oleh saudari AU sebagai berikut,

“Terkait dengan kedekatan dengan calon sebenarnya pada pilgub kemarin, keluarga saya memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pasangan calon, tapi saya tidak memilih berdasarkan hubungan keluarga. saya memilih karena kepopuleran calon gubernur kemarin di media sosial, apalagi di media sosial sangat ramai diberitakan mengenai calon-calon dan saya dapat mengambil referensi dari situ untuk menentukan pilihan saya berdasarkan apa yang saya dapat di sosial media”

Faktor kekeluargaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan landasan atau referensi dalam menentukan pilihan dalam proses pemilihan umum berdasarkan wawancara dengan saudari AU (08 desember 2018), tapi karena kepopulerannya dan ramainya berita mengenai salah satu pasangan calon di media sosial. Terkait dengan pemilih milenial yang lebih banyak menggunakan sosial media dan juga

memanfaatkan media sosial sebagai salah satu referensi dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum juga disampaikan oleh bapak AS selaku komisioner KPU Makassar bahwa,

“Sebenarnya kalo dilihat dari survey di media sosial ternyata perilaku pemilih milenial perilakunya tidak dapat diprediksi dan pemilih milenial sekarang banyak mendapat informasi dari medsos tapi belum tentu informasi yang didapat di media sosial dapat mempengaruhi pilihannya dan belum pasti bahwa pemilih muda akan memilih calon yang muda juga milenial dan bisa juga informasi yang didapat mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih, pemilih milenial banyak mempunyai referensi dari media sosial”

Pentingnya media sosial sebagai referensi dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum dalam wawancara dengan bapak AS (07 November 2018) maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, sebagai generasi milenial yang kesehariannya banyak aktif di media sosial dan memperoleh berbagai informasi dari internet, tentu saja memilih yang berdasar pada kepopuleran calon di media sosial.

Kepopuleran serta Kekaguman terhadap kandidat menjadi alasan pemilih pemula menjatuhkan pilihannya, mereka merasa telah mengenal sosok calon pemimpin yang dipilihnya baik itu latar belakang maupun pengalaman politik sebelumnya.

Penetapan pilihan karena pemilih milenial mengidolakan kandidat tersebut sehingga, para pemilih milenial lebih mudah percaya dalam memimpin, dengan melihat pengalamannya dan adanya ikatan emosional yang ada pada dirinya karena sifat merakyat yang menurutnya pantas menjadi seorang pemimpin. Hal ini sesuai dengan teori psikologi Dieter Roth bahwa proses pemilihan melalui identifikasi partai yaitu pemilihan yang berdasarkan pada pemilihan nama

seseorang yang merasa dekat dengan salah satu partai. Identifikasi partai diartikan sebagai perasaan yang sangat dekat yang dimiliki oleh seseorang terhadap salah satu partai.

Berdasarkan hasil observasi penulis tentang model psikologis pemilih milenial dalam pemilihan Gubernur Sulawesi selatan 2018, biasanya pemilih milenial memilih calon karena calon tersebut terkenal atau populer dan itu menjadi alasan pemilih milenial tertarik untuk memilih, hal ini sesuai survey poltracking Indonesia bahwa sebanyak 31.67% memilih calon pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 berdasarkan kepopuleran calon tersebut karena kepopulerannya baik itu di media sosial maupun media massa. Penentuan pilihan para pemilih milenial yang kesehariannya dapat dikatakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan internet atau media sosial.

3. Model Pilihan Rasional

Kriteria pilihan rasional mengasumsikan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diinginkan sebagai suatu *outcome* dan memiliki kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda untuk menjamin pilihannya sebagai sebuah alternatif setiap waktu. Maksudnya seseorang yang mempunyai informasi yang memungkinkannya untuk membuat suatu pilihan. Pendekatan ini mengandaikan bahwa calon atau partai yang bersaing akan mengupayakan dan berusaha untuk menyampaikan berbagai program untuk menarik perhatian dan kemauan pemilih.

Pilihan rasional beranggapan bahwa seseorang memilih calon atau partai jika calon atau partai tersebut dianggap dapat membantu pemilih untuk memenuhi

kepentingan dasarnya yaitu kehidupan ekonomi, karena itu model ini juga disebut dengan pendekatan ekonomis. berdasarkan pendekatan ini, pemilih diharuskan mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, misalnya tiap-tiap parpol yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada.

Model pilihan rasional menganggap kegiatan memilih seseorang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang tidak hanya mempertimbangkan “ongkos” memilih serta kemungkinan perolehan suara yang mampu memengaruhi hasil yang diharapkan. Tetapi model ini dimanfaatkan pemilih dan kandidat yang akan mencalonkan diri agar terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, untung dan rugi digunakan sebagai referensi untuk membuat suatu kesimpulan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama dalam membuat keputusan ikut sertadalam pemilihan umum atau tidak ikut memilih. Pertimbangan pemilih pada pendekatan rasional lebih kepada visi misi, kepribadian dan program kerja yang dijanjikan oleh calon.

Perilaku pemilih milenial di kota Makassar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan berdasar pada model pilihan rasional, berdasarkan wawancara dengan bapak AZ sebagai berikut,

“Pemilih milenial dapat digolongkan dalam pemilih yang actual, memilih calon yang masuk diakalnya, kandidatnya, program-programnya , orientasi calon terhadap masalah-masalah, dan ini sangat berpengaruh dalam menentukan sikapnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AZ selaku teknisi KPU pada 21 November 2019 provinsi Sulawesi selatan dapat disimpulkan bahwa Pemilih milenial sebagai pemilih yang actual dalam menentukan pilihannya memiliki pandangan tersendiri dalam pemilihan umum serta penyelesaian masalah yang

ada, bahwa pemilih milenial memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang ia inginkan sebagai sebuah hasil dan memiliki beberapa kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda untuk menjamin pilihannya. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi Downs tentang demokrasi adalah bahwa arena pemilu seperti sebuah pasar yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih).

Orientasi calon kepala daerah dalam memecahkan masalah yang ada juga disampaikan oleh saudara AR sebagai berikut,

“Sebenarnya saya kemarin memilih tidak melihat dari visi misinya karena saya tidak terlalu mengerti mengenai itu, saya cuma melihat bagaimana caranya berbicara dari pasangan calon pada saat debat. Dan yang paling besar pengaruhnya pada saya untuk memilih pasangan calon adalah hasil kerjanya, dan saya sangat penasaran bagaimana seorang prof dalam melaksanakan pemerintahan, bagaimana caranya mengubah Bantaeng yang dulunya hanya kabupaten kecil sekarang menjadi maju karena pak Nurdin, dan saya sangat berharap bahwa apa yang dilakukan di Bantaeng bisa juga diimplementasikan di Sulawesi selatan, walaupun sebenarnya ini sangat susah karena Sulawesi selatan kan luas berbeda dengan Bantaeng”.

Kinerja serta pengalaman calon kepala daerah dalam pemerintahan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan pilihan terutama pemilih milenial dalam wawancara dengan saudara AR (08 desember 2018). Selain pentingnya visi dan misi kinerja dalam pemerintahan sebelumnya merupakan evaluasi dari berhasilnya rancangan visi dan misi calon kepala daerah dalam pemerintahan sebelumnya. Terkait visi dan misi dalam menentukan pilihan dalam pemilihan gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 juga disampaikan oleh saudara MRA sebagai berikut,

“ Saya memilih calon pada pilgub berdasarkan pada apa yang saya lihat di lapangan, saya melihat kinerja para calon sebelum memilih dan saya juga

mempertimbangkan visi misinya apakah ini calon bisa ji mensejahterakan masyarakat atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara MRA bahwa sebelum memilih perlu diperimbangkan kinerja dari calon tersebut serta visi dan misinya dalam mensejahterakan masyarakat. Visi misi serta kinerja yang diprogramkan merupakan salah satu alasan dalam menentukan pilihan, Hal yang sama disampaikan oleh saudari NF sebagai berikut,

“ Iya adapun visi dan misi calon gubernur utamanya sangat perlu diperhatikan, karena dari visi dan misi kita dapat melihat sejauh mana sikap para pemimpin, apakah para pemimpin mampu membangun sulsel menjadi lebih maju”

Kekuatan dari suatu visi dan misi dari para calon kepala daerah merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh pemilih milenial sesuai dengan hasil wawancara dengan saudara MRA (08 desember 2018) dan berdasarkan wawancara dengan saudari NF (29 November 2018). Program-program yang dijanjikan menjadi salah satu alasan dalam menentukan pilihan, dengan melihat program yang dijanjikan tentu hal ini membuat mereka yakin dalam memilih calon pemimpin tersebut. Karena dengan terlaksananya program tersebut secara otomatis akan lebih mensejahterakan masyarakat, namun kemungkinan tidak berjalannya program yang telah dijanjikan masih belum jelas, ini merupakan alasan yang rasional dalam memilih calon pemimpin serta tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pemilih milenial dalam hal ini dapat memilih secara rasional dalam menggunakan hak pilih yang diberikan dengan beberapa pertimbangan dengan melihat program-program yang dijanjikan bahkan melihat dari pengalaman-pengalaman dalam berpolitik yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan

teori Downs bahwa teori rasional pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Bagi pemilih perhitungan untung dan rugi digunakan untuk memutuskan tentang partai atau kandidat yang dipilih khususnya untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

Terkait pemilih milenial yang berperan aktif dalam poses politik dan pemilihan umum, khususnya pada pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 sesuai dengan teori dari Tapscott dalam Isnaini (2017) yang mengemukakan bahwa, sebagai generasi yang besar pada era digital, generasi milenial akan menyapu habis model politik konvensional. Generasi milenial justru ingin dilibatkan secara langsung, berinteraksi dengan politisi dan masyarakat, menyumbangkan gagasan, melahirkan prakarsa katalisator tidak hanya selama pemilihan, tetapi juga pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis tentang pilihan rasional pemilih milenial dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi selatan tahun 2018, pemilih milenial rata-rata lebih tertarik milih yaitu sebanyak 55.00% pemilih memilih calon Gubernur Sulawesi selatan dari visi dan misi calon serta kinerja calon pada pemerintahan sebelumnya dan cara menyelesaikan masalah serta mensejahterakan masyarakat.

Pemilih sekarang atau pemilih milenial khususnya di kota Makassar dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan secara otomatis tidak akan mudah terpengaruh oleh apa yang disampaikan orang lain

serta didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi, semua orang termasuk para pemilih milenial sangat mudah mendapatkan informasi baik itu dari media massa ataupun media sosial, maka akan sangat mudah membandingkan antara calon satu dengan yang lainnya baik itu dari pengalaman politiknya ataupun dari visi dan misinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perilaku politik pemilih milenial dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 di kota Makassar , dengan indikator perilaku menurut Gaffar yaitu, Pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional yang dapat disimpulkan bahwa,

Pemilih milenial yang secara nasional di seluruh Indonesia baik tingkat nasional, daerah/ kabupaten kota dan desa, jumlahnya mencapai 30% dari daftar pemilih tetap termasuk di Makassar, perilaku dari para pemilih milenial ini yang hidup berbarengan dengan teknologi lebih dominan dengan persentase 55.00%. pada model pilihan rasional yang melihat program kerja yang ditawarkan dan kinerja pada pemerintahan sebelumnya, serta kepopuleran calon di media sosial yang dijadikan para pemilih milenial sebagai referensi dalam menentukan pilihannya.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan sosiologis atau pengaruh dari orang tua serta pilihan psikologis atau pilihan berdasarkan pada kedekatatan atau kepopuleran dengan calon kepala daerah juga tidak dapat dihilangkan, yang juga merupakan salah satu faktor atau pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam proses pemilihan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil diskusi dan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki atau memberikan pengetahuan tentang perilaku pemilih milenial dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 di kota Makassar:

1. perlunya pendidikan politik untuk para pemilih milenial agar dapat menentukan pilihannya dengan pertimbangan yang baik tanpa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun dalam pemilihan umum dan hak pilinya dapat digunakan dengan baik.
2. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.

RIWAYAT HIDUP



DEWI SAGITA, Dilahirkan di Selayar pada Tanggal 20 Desember 1996. Anak Kelima dari Lima Bersaudara. Anak dari Pasangan Dg. Malewa dan Dg. Tapakja. Penulis Awal Mengenal Pendidikan Di SDN Unjuruiya Pada Tahun 2002 dan Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Tahun 2008. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Di SMPN 3 Bontomatene Dan Tamat Pada Tahun 2011. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMA Muhammadiyah benteng Kabupaten kepulauan Selayar Dan Selesai Pada Tahun 2014. Pada Tahun Yang Sama Pula Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya Di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan Penulis Menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2019.

